ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare)

Aulia Nur Rahmah[1], Yadi Arodhiskara[2], Sariana Damis[3]
Email: aulianurrahma221200003@gmail.com[1], yadhi01@gmail.com[2] sarianadamis@gmail.com[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di BKD Kota Parepare dari Juni hingga Juli 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci serta didukung data sekunder. Analisis data melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami implementasi SAKD dan SPIP serta hubungannya secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKD di BKD Kota Parepare telah sesuai peraturan (Permendagri No. 77/2020 dan PP No. 71/2010), mencakup pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang sistematis. SPIP juga diterapkan dengan baik, didukung lingkungan pengendalian kuat, mitigasi risiko memadai, dan pengawasan berjenjang. Hubungan antara SAKD dan SPIP sangat erat, di mana SAKD yang tertib memperkuat pengendalian intern, dan SPI yang efektif mendukung proses akuntansi, sehingga mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Transparansi, Akuntabilitas, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

.

Abstrack

The method used was a descriptive qualitative approach, conducted at the Parepare City Regional Personnel Agency (BKD) from June to July 2025. Data were obtained through in-depth interviews with three key informants and supported by secondary data. Data analysis involved data reduction, presentation, and drawing conclusions to comprehensively understand the implementation of SAKD and SPIP and their relationship. The results indicate that the implementation of SAKD at the Parepare City BKD complies with regulations (Minister of Home Affairs Regulation No. 77/2020 and Government Regulation No. 71/2010), including systematic recording, summarization, and reporting. SPIP is also well implemented, supported by a strong control environment, adequate risk mitigation, and hierarchical supervision. The relationship between SAKD and SPIP is very close, with an orderly SAKD strengthening internal control, and an effective SPI supporting the accounting process, thus realizing accountability and good governance.

Keywords: Regional Financial Accounting System (SAKD), Government Internal Control System (SPIP), Transparency, Accountability, Parepare City Regional Finance Agency

PENDAHULUAN

Tata Kelola pemerintah yang baik merupakan cerminan sebuah keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan yang direncanakan. Agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tata Kelola yang baik maka pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah yaitu dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Good governance merupakan suatu konsep dimana proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sebagai hasil dari suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara[1].

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penilaian kinerja yang menjadi wujud pertanggungjawaban bahan untuk pengambilan keputusan pada bidang keuangan[2].

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah[3].

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri,No 21 Tahun 2011) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sistem pengendalian yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan maupun non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi[4]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemdagri) Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (accrual basis), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut[5].

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunggjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepare yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalamproses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pengawasan internal di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten atau Kota. Menurut Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013), dimensi untuk mengukur sistem pengendalian internal, meliputi: lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal[5].

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penghapusan barang milik daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sistem ini juga memperkenalkan istilah baru seperti Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang untuk memperjelas tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah[6].

Sistem Pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). struktur pengendalian intern meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Salah satu keuntungan bagi manajemen adalah untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek operasi dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan[8].

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan menguji sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Sistem akuntabilitas keuangan daerah yang tidak efektif dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bisa mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan potensi penyimpangan dana menjadi lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan suatu data dan mempresentasikan hasilnya. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci. Analisis data melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami implementasi SAKD dan SPIP serta hubungannya secara komprehensif.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Sumber Data Primer, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data Sekunder data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan sumber data lainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan survei di tempat terkait mendalam dengan stakeholders terkait. Observasi langsung terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik yang ada. Data ini berbentuk deskripsi naratif yang menggambarkan proses, kebijakan, dan pengalaman terkait dengan pengelolaan dan penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi. Pertanyaan wawancara akan berfokus pada proses pengelolaan, tantangan yang dihadapi, penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi, dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare ini berhasil mengumpulkan data dan informasi mengenai Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan dampaknya terhadap Sistem Pengendalian intern pemerintah. Melalui hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, terungkap bagaimana memahami Implementasi dan hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

setiap transaksi keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diidentifikasi melalui dokumen pendukung seperti SPM dan bukti transaksi lain, kemudian dicatat secara kronologis dalam jurnal umum dan dipindahkan ke buku besar sesuai SOP yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi SAKD di Parepare telah berjalan sesuai ketentuan

regulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatimah dan Indrawati (2022) yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah[9].

laporan keuangan yang disusun secara periodik meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta laporan operasional lainnya. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan mengacu pada PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Temuan ini diperkuat oleh Hanifah dan Haryanto (2021) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga mendukung kualitas pelaporan pemerintah daerah[10].

penerapan SAKD berdampak positif terhadap efektivitas SPIP, terutama melalui mekanisme pemisahan tugas, otorisasi, serta komunikasi antar bagian yang lebih terstruktur, diperoleh gambaran umum mengenai implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) serta kaitannya dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan kerja mereka. Dalam hal pencatatan transaksi keuangan, pihak BKD Parepare menjelaskan bahwa proses identifikasi transaksi dimulai dari penerimaan dokumen sumber seperti SPM (Surat Perintah Membayar), bukti pengeluaran, atau dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang untuk memastikan keabsahannya sebelum dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Pencatatan dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis teknologi, seperti SIPD RI Keuangan, guna menjamin akurasi dan konsistensi data[11].

Arus informasi keuangan juga dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan ketepatan waktu. BKD menggunakan sistem informasi keuangan daerah untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan diperbarui secara real-time oleh unit yang berwenang. Komunikasi antar bagian dikatakan berjalan cukup lancar, dengan dukungan forum koordinasi rutin yang menjadi sarana penyampaian isu dan penyelesaian masalah operasional secara cepat. Evaluasi terhadap pengendalian internal dilakukan oleh tim internal dan juga oleh Inspektorat Daerah secara periodik. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi korektif, baik dalam bentuk perbaikan sistem, penegakan SOP, maupun penguatan kapasitas SDM. Temuan audit atau evaluasi tidak dianggap sebagai kesalahan semata, tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan tata kelola di masa mendatang[12].

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare telah berjalan dengan baik, sejalan dengan peraturan yang ada. Prosesnya dimulai dari pencatatan setiap transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Setelah itu, data diolah melalui tahap pengikhtisaran untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit, dan diakhiri dengan pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Implementasi SAKD yang efektif ini terbukti memberikan dampak signifikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), karena SAKD yang tertib secara langsung memperkuat setiap elemen SPIP.

Evaluasi pengendalian internal dilakukan secara berkala oleh unit internal dan Inspektorat. Tindak lanjut atas temuan audit dilakukan dengan pendekatan korektif, mencerminkan penerapan *Monitoring Activities* sebagai komponen kelima dalam COSO Framework. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare dapat dievaluasi secara efektif melalui lima unsur utamanya, dengan SAKD sebagai instrumen pendukung yang kuat. Lingkungan pengendalian sudah sangat baik, ditunjukkan oleh komitmen pimpinan dan integritas pegawai. Dalam hal penilaian risiko, instansi telah mengidentifikasi risiko kesalahan data dan secara proaktif menggunakan SAKD untuk mengatasinya[13].

SAKD sendiri berfungsi sebagai kegiatan pengendalian yang efektif; fitur validasi data dan otorisasi berlapis di dalamnya adalah contoh nyata bagaimana sistem dapat mencegah kesalahan sejak dini. SAKD juga berperan besar dalam informasi dan komunikasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan. Terakhir, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan melalui audit internal dan evaluasi berkala. Sebagai solusi, BKD dapat mengintegrasikan SAKD lebih dalam dengan fungsi pemantauan untuk memberikan laporan audit secara *real-time*, sehingga

setiap kelemahan dapat segera ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, SAKD telah memperkuat SPIP, menunjukkan bahwa sistem teknologi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik[14].

Dampak langsung dari implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Saya menyimpulkan bahwa hubungan antara keduanya sangat erat dan saling menguatkan. SAKD tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi telah menjadi instrumen pengendalian yang efektif. Fitur-fitur otomatis di dalamnya, seperti validasi data dan otorisasi berjenjang, secara langsung menjadi kegiatan pengendalian yang mencegah kesalahan dan kecurangan[15].

SAKD berhasil meningkatkan kualitas informasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Kualitas informasi inilah yang menjadi kunci utama bagi pimpinan dalam melakukan pemantauan yang efektif terhadap proses pengelolaan keuangan. Dengan demikian, implementasi SAKD telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan PP No. 71 Tahun 2010. Proses pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sistematis dengan dukungan aplikasi keuangan daerah dan didampingi mekanisme verifikasi internal yang ketat.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKD Kota Parepare telah diterapkan melalui lingkungan pengendalian yang baik, identifikasi dan mitigasi risiko yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Komunikasi antar unit kerja dan pengelolaan informasi keuangan mendukung terjaganya akurasi, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
3. Keterkaitan antara SAKD dan SPIP sangat erat, di mana pelaksanaan sistem akuntansi yang tertib turut memperkuat pengendalian intern pemerintah, dan sebaliknya, pengendalian yang efektif memastikan bahwa proses akuntansi berjalan sesuai prosedur. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam peningkatan implementasi kedua sistem tersebut di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan maka penulis dapat menyarankan agar Badan Keuangan Daerah terus memperkuat pengendalian intern melalui pengawasan yang berjenjang, pemisahan tugas yang tegas, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan juga perlu dijadikan budaya kerja yang konsisten guna mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan.

Diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKD dan SPIP. Fokus utama adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah secara optimal, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah agar data keuangan dapat disajikan lebih cepat dan akurat. Dengan langkah tersebut, diharapkan efektivitas SPIP semakin kuat dan kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andi, A. (2021). *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D) Terhadap Penyerapan Dana Apbd Pada Badan …. 4*, 1001–1015. http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/1026/1/85 ANDI ASWAD.pdf

[2] Dewi, D. S., & Susilowati, E. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *4*(2), 1049–1064. https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4507

[3]Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Barat*.

[4]Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, *10*(1), 56–64.

[5]Hadi jauhari, suhairi hazisma, evada dewata. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, *8*(1), 1–23.

[6]Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. B. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Open Journal Systems*, *15*(12), 5889–5896.

[7]Lumintang, G. S., Lambey, L., & Tangkuman, S. (2017). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Manado). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 950–962. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18372.2017

[8]Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). A nalisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur Analysis of regional financial capacity in the context of implementing regional autonomy in the province of East Nusa Tenggara. *Un*, *17*(1), 184–197.

[9]Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 423–432. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093

[10]Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, *9*(5), 43–51. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286

[11]Seiring, L. B., Negara, K., No, U. U., Negara, P., No, U. U., Pengelolaan, P., Jawab, T., & Negara, K. (n.d.). *BAB I. 1*.

[12]Suci Pangestuning Ajeng, I., & Wadhan, W. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, *3*(2), 141–164. https://doi.org/10.19105/sfj.v3i2.8889

[13]Sudarta. (2022). *Nurrohmah dan Aizah (2023) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah kota Probolinggo. 16*(1), 1–23.

[14]Ummah, M. S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Tekonologi Informasi Terhadap Kuaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

[15]Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(4), 1–24.